

Pengaruh Ketimpangan Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum Terhadap IPM Jawa Timur Tahun 2020-2024

Mia Berliana Putri

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.
Email: miaberliana.22029@mhs.unesa.ac.id

Wenny Restikasari

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.
Email: wennyrestikasari@unesa.ac.id

Abstrak

Saat ini, tingkat kemajuan suatu negara bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai, tetapi juga sejauh mana kualitas masyarakatnya terbangun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rujukan pertama utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan objek 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengangguran mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. Di sisi lain, upah minimum terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang terintegrasi dan tepat sasaran, antara lain melalui penguatan layanan kesehatan preventif berbasis risiko, peningkatan akses serta kualitas pendidikan dalam keluarga, dan penyesuaian kebijakan upah dengan produktivitas pelatihan melalui serta pemberian insentif bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci : Ketimpangan, Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum.

JEL : I31

Abstract

Today, a country's progress is no longer solely measured by the magnitude of economic growth, but also by the quality of its human development. The Human Development Index (HDI) is a crucial indicator for assessing the success of development oriented toward public welfare. This study aims to analyze the influence of poverty, unemployment, and minimum wages on the HDI in East Java Province. This study uses a panel data regression approach across 38 districts/cities in East Java during the 2020–2024 period, utilizing secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The estimation results indicate that poverty has a negative and significant effect on the HDI, while unemployment has a negative but statistically insignificant effect. Meanwhile, the minimum wage has a positive and significant effect on the HDI. Simultaneously, these three independent variables significantly influence the HDI. These findings indicate the need for integrated and targeted policies, such as strengthening risk-based preventive health services, increasing access to and quality of family education, and synergizing wage and productivity policies through training and incentives for MSMEs.

How to Cite: Putri, M. B., & Restikasari, W. (2026). Pengaruh Ketimpangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2020-2024. *Independent : Journal Of Economics*, 6(2), 169-191

Keywords: *Inequality, Poverty, Unemployment, Minimum Wage.*

JEL : 131

PENDAHULUAN

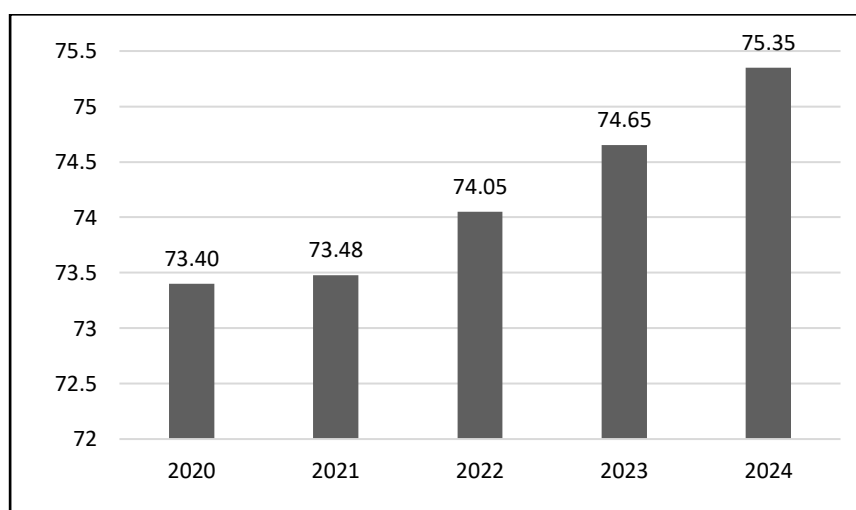
Pandemi Covid-19 telah menorehkan luka yang begitu dalam dan meluas, jauh melampaui sekadar krisis kesehatan. Virus ini merambat cepat ke seluruh sendi kehidupan, melumpuhkan perekonomian berbagai negara, dan Indonesia menjadi salah satu yang merasakan dampaknya begitu telak (Rahmadia Shinta, 2020). Di tengah situasi genting itu, Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua secara nasional dalam hal peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi, tepat di bawah DKI Jakarta (Widiawaty *et al.*, 2022). Konsekuensinya tidak berhenti pada angka keterpaparan, melainkan menjalar ke sektor ekonomi dan sosial yang mengalami tekanan luar biasa. Gelombang pemutusan hubungan kerja, melambatnya roda industri, dan ketidakpastian hidup sehari-hari menjadi pemandangan umum yang menghantui masyarakat. Tekanan multidimensional ini kemudian tercermin jelas dalam berbagai indikator makroekonomi dan sosial, tak terkecuali Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ikut tertekan akibat situasi krisis tersebut (Nurfilah & Satiti, 2023). Penurunan IPM menjadi cermin pahit dari memburuknya akses terhadap layanan kesehatan, terhambatnya proses pendidikan, dan merosotnya pendapatan masyarakat selama masa pandemi. Menyadari besarnya dampak yang harus ditanggung, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun bergerak cepat dengan mengalokasikan sumber daya yang tidak sedikit. Berdasarkan Peraturan Daerah Jatim Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Jatim Tahun Anggaran 2021, belanja daerah direncanakan sebesar Rp33 triliun, dengan Rp1 triliun di antaranya dialokasikan sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19. Jumlah tersebut merupakan bagian dari alokasi bidang kesehatan yang mencapai Rp4,5 triliun (Ambrosius Harto, 2021), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam berupaya menahan laju krisis dan melindungi warganya dari kehancuran yang lebih dalam.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi berpotensi bergeser ke arah serta pencapaian berbagai target pembangunan, baik yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting dalam mengelola serta menyesuaikan kebijakan selama masa transisi menuju era kenormalan baru agar tidak terjadi krisis berkepanjangan yang dapat menghambat proses Pembangunan nasional. Penyesuaian kebijakan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan strategi serta arah pembangunan jangka menengah yang saat ini tengah dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi (Muhyiddin *et al.*, 2024). Peningkatan nilai IPM mencerminkan keberhasilan suatu wilayah dalam mengembangkan karakteristik /mutu penduduk, berpengetahuan, serta memiliki produktivitas tinggi, yang berperan penting dalam mendorong terciptanya Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Faizin, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan teori human capital yang menekankan pentingnya kualitas manusia dalam meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Gary S. Becker. Teori human capital yang dikemukakan oleh Gary S. Becker investasi dalam sumber daya manusia sebagai aktivitas yang meningkatkan kemampuan fisik dan mental individu, sehingga meningkatkan prospek pendapatan

riil di masa depan. Investasi ini mencakup berbagai bentuk seperti pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, perawatan kesehatan, dan akuisisi informasi, yang kesemuanya memerlukan pengorbanan biaya langsung maupun pendapatan yang dikorbankan (*opportunity cost*) di masa sekarang untuk memperoleh imbal hasil di kemudian hari. Becker membedakan antara pelatihan umum (*general training*) yang meningkatkan produktivitas di banyak perusahaan dengan biaya tersebut tercermin dalam tingkat upah pekerja yang lebih rendah selama masa pelatihan dan pelatihan khusus (*specific training*) yang lebih bermanfaat hanya di perusahaan pemberi pelatihan, di mana biaya dan return dibagi antara pekerja dan perusahaan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana investasi dalam human capital memengaruhi kurva pendapatan sepanjang usia, distribusi pendapatan yang miring positif, serta tingkat perpindahan dan pengangguran pekerja, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang menyatukan berbagai fenomena empiris dalam ekonomi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1962).

Sebagai salah satu pendorong utama perekonomian nasional, Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis yang menempati peringkat kedua dalam kontribusinya terhadap PDRB terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Timur akan penyumbang 14,57% terhadap PDB Indonesia (Susetyoko et al., 2023). Keunggulan ini ditopang oleh struktur ekonomi yang relatif beragam, mencakup sektor industri manufaktur, pertanian, hingga sektor jasa yang berkembang pesat. Meskipun demikian, dibalik kekuatan ekonomi tersebut, Jawa Timur masih dihadapkan pada sejumlah persoalan sosial yang cukup kompleks, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingkat Kemiskinan yang masih signifikan, serta tingkat pengangguran yang cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu (Alfin et al., 2023).



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Sumber : (BPS, 2025)

Selama kurun waktu 2020–2024, IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang konsisten. Dari semula 73,04 pada tahun 2020, peningkatan bertambah menjadi 75,35 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur semakin membaik pasca pandemi COVID-19. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, laju pertumbuhan indeks Pembangunan

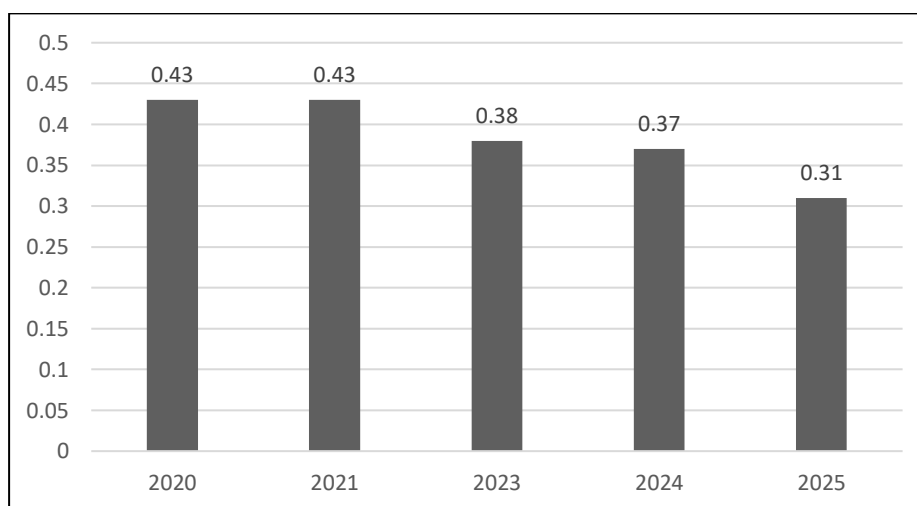
manusia (IPM) sempat melambat pada awal periode pandemi (2020–2021) yang hanya meningkat 0,44 indeks, sebelum kembali menguat pada periode. Pemulihan ekonomi (2022–2024) dengan peningkatan rata-rata lebih dari 0,6 indeks per tahun. Indeks pembangunan manusia di setiap provinsi belumlah merata sempurna, yang dimana dapat disimpulkan bahwa kesehatan, Pendidikan, dan Standar layak hidup setiap provinsi memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur terlihat jelas melalui perbedaan yang mencolok antara wilayah metropolitan dan daerah pinggiran. Hanya kota-kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo yang berhasil mencapai kategori lebih dari 80 Indeks. Sebaliknya, sejumlah kabupaten, terutama di Pulau Madura seperti Sampang dan Bangkalan serta beberapa daerah di kawasan Tapal Kuda, masih berada pada tingkat menengah sekitar 60 Indeks. Kesenjangan hampir 20 poin ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam akses terhadap kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Faktor geografis serta keinginannya investasi di wilayah Gerbangkertosusila semakin memperdalam ketimpangan struktural antara pusat pertumbuhan dan daerah penyangga dalam pembangunan manusia di Jawa Timur (Simalango Mikhael, 2024). Seiring waktu, ketimpangan ini berpotensi menghambat pencapaian pembangunan inklusif dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Jawa Timur.

Pandemi COVID-19 benar-benar menghantam sendi-sendi perekonomian global dengan kekuatan yang tak terduga, dan Indonesia turut merasakan getah pahitnya. Dalam waktu singkat, roda ekonomi yang biasa berputar kencang tiba-tiba melambat, bahkan berhenti di berbagai sektor. Banyak kepala rumah tangga yang sebelumnya gagah mencari nafkah harus gigit jari karena usahanya gulung tikar atau dirumahkan tanpa kepastian. Dari situlah kesejahteraan masyarakat mulai tergerus tabungan habis untuk kebutuhan pokok, asuransi kesehatan terpaksa tidak diperpanjang, dan rencana masa depan buyar seketika. Akumulasi dari tekanan ekonomi ini kemudian berujung pada satu kenyataan pahit: angka kemiskinan nasional yang melonjak, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya berada di ambang batas akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan. Lebih memprihatinkan lagi, krisis ini tidak mencipta kerataan derita; ia justru memperlebar jurang antara mereka yang berada di puncak dan mereka yang berjuang di dasar. Kelompok masyarakat mampu relatif lebih bertahan karena memiliki bantalan finansial dan akses terhadap berbagai peluang, sementara kelompok rentan semakin terhimpit dan sulit bangkit. Di sisi lain, angka pengangguran melonjak tajam karena pembatasan aktivitas ekonomi memaksa banyak industri mengurangi produksi, merumahkan karyawan, bahkan menutup usaha. Para pekerja harian, buruh pabrik, dan pelaku sektor informal menjadi pihak yang paling pertama merasakan pahitnya kehilangan pendapatan. Dengan demikian, pandemi tidak hanya menyisakan luka kesehatan, tetapi juga meninggalkan bekas mendalam pada struktur sosial ekonomi bangsa yang membutuhkan waktu panjang untuk pulih.

COVID-19 bikin keadaan ekonomi dunia sakit keras. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang tutup. Namun, beban yang paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Pada kelompok orang dewasa, mereka yang berpenghasilan rendah dan orang-orang miskin menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Kelompok rentan ini harus berjuang menghadapi masa-masa yang sangat sulit

untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka di tengah ancaman penyakit COVID-19. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang memadai, serta ketiadaan jaring pengaman sosial yang kuat membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi (Kumar & Pinky, 2021).

Kondisi tersebut pada akhirnya semakin memperparah ketimpangan kemiskinan yang sebelumnya sudah ada. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, situasi krisis justru menuntut adanya pengeluaran tambahan, seperti biaya kesehatan, pembelian alat pelindung diri, hingga kebutuhan menjaga daya tahan tubuh. Bagi kelompok rentan, biaya tambahan ini bukanlah hal yang mudah untuk dipenuhi. Ketika pendapatan menurun tetapi kebutuhan meningkat, tekanan ekonomi pun menjadi semakin berat dan jarak antara kondisi ekonomi mereka dengan garis kemiskinan semakin melebar.



Gambar 2. Ketimpangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur
Sumber (BPS, 2025)

Dalam konteks ini, Indeks Ketimpangan Kemiskinan berperan penting untuk menggambarkan sejauh mana pengeluaran masyarakat miskin masih tertinggal dari garis kemiskinan. Indeks ini tidak hanya menunjukkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengukur tingkat kebocoran pengeluaran mereka terhadap batas kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin besar pula kekurangan pengeluaran yang dialami oleh penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Artinya, beban yang harus mereka tanggung untuk keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakin berat. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan indeks bukan sekedar angka statistik, melainkan cerminan dari semakin sulitnya upaya masyarakat miskin untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Ibrahim, 2025).

Ketimpangan kemiskinan (P2) mengalami stagnasi pada level yang mengkhawatirkan, yaitu 0,43 pada tahun 2020 dan 2021, meskipun indeks ini berhasil diturunkan menjadi 0,38 pada periode 2022-2023, angka tersebut masih tertahan pada level yang relatif tinggi selama dua tahun berturut-turut, sebelum akhirnya turun signifikan menjadi 0,31 di tahun 2024. P2 secara spesifik menangkap dampak tidak

merata dari pandemi pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Krisis kesehatan cenderung memperparah ketimpangan diantara penduduk miskin, di mana kelompok termiskin mengalami penurunan kondisi yang paling drastis. P1 tidak mampu menangkap fenomena ini karena hanya mengukur rata-rata kesenjangan tanpa melihat distribusi. Berdasarkan studi (Suryahadi et al., 2020) tentang efek COVID-19 di Indonesia, krisis kesehatan menimbulkan dampak distribusional yang tidak merata. Kelompok termiskin mengalami penurunan pengeluaran 9-12%, sementara kelompok atas hanya 0-5%. P2 secara spesifik dirancang untuk menangkap ketimpangan ini. P2 mengukur ketimpangan distribusi kemiskinan yang selaras dengan paradigma pembangunan inklusif dan konsep *leaving no one behind* dalam SDGs. P2 menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih *targetted* dan efektif untuk intervensi kelompok termiskin, sehingga optimal dalam mendukung peningkatan IPM. P2 selaras dengan filosofi IPM yang menekankan pemerataan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, dimana kemiskinan ekstrem menjadi penghambat utama. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa kemajuan pembangunan menjangkau semua segmen masyarakat, khususnya kelompok paling tertinggal dan terpinggirkan (UNDP., 2018).

Menurut Amartya Sen dalam Teori Kapabilitas, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya tingkat pendapatan, melainkan sebagai bentuk deprivasi kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu keterbatasan individu dalam memperoleh kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Deprivasi tersebut ditunjukkan pada ketidakmampuan masyarakat mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks Keparahan Kemiskinan/P2) tidak hanya menunjukkan seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar kesenjangan kesejahteraan di antara penduduk miskin, yang mengindikasikan bahwa kelompok termiskin mengalami deprivasi kapabilitas yang lebih berat dibandingkan kelompok miskin lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Sen bahwa pembangunan manusia akan terhambat ketika individu kehilangan kebebasan dan kemampuan untuk memperoleh layanan dasar serta mengembangkan potensinya secara optimal (Sen, 1992).

P2 secara spesifik menangkap dampak tidak merata dari pandemi pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Krisis kesehatan cenderung memperparah ketimpangan diantara penduduk miskin, di mana kelompok termiskin mengalami penurunan kondisi yang paling drastis. P1 tidak mampu menangkap fenomena ini karena hanya mengukur rata-rata kesenjangan tanpa melihat distribusi. Berdasarkan studi (Suryahadi et al., 2020) tentang pengaruh COVID-19 di Indonesia, krisis kesehatan menimbulkan dampak distribusional yang tidak merata. Kelompok termiskin mengalami penurunan pengeluaran 9-12%, sementara kelompok atas hanya 0-5%. P2 secara spesifik dirancang untuk menangkap ketimpangan ini. P2 mengukur ketimpangan distribusi kemiskinan yang selaras dengan paradigma pembangunan inklusif dan konsep *leaving no one behind* dalam SDGs. P2 menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih *targetted* dan efektif untuk intervensi kelompok

termiskin, sehingga optimal dalam mendukung peningkatan IPM. P2 selaras dengan filosofi IPM yang menekankan pemerataan akses terhadap kesehatan dan pendidikan, dimana kemiskinan ekstrem menjadi penghambat utama. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa kemajuan pembangunan menjangkau semua segmen masyarakat, khususnya kelompok paling tertinggal dan terpinggirkan (UNDP., 2018).

Menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak bisa diukur dikaji dari satu aspek semata, misalnya pendapatan. Konsep kemiskinan harus dipandang secara lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, serta sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan dan akses yang setara dalam menjalankan aktivitas ekonominya (Sen, 1983). Menurut Sen, ada tiga aspek kunci untuk memahami kemiskinan. Penyebab absolut kemiskinan adalah kurangnya kesempatan. Kekurangan ini memengaruhi baik kemiskinan aktual setiap individu maupun tingkat kekayaan dan pendapatan yang menjamin kehidupan yang bermartabat. Meskipun perbedaan pendapatan dan kekayaan dapat menjadi indikator langsung tingkat kemiskinan seseorang, indikator ini lebih merupakan konsekuensi daripada penyebab kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun penting untuk dipertimbangkan, hal itu tetap relatif, karena bergantung pada standar hidup spesifik di negara atau komunitas politik tersebut (Sen, 1992).

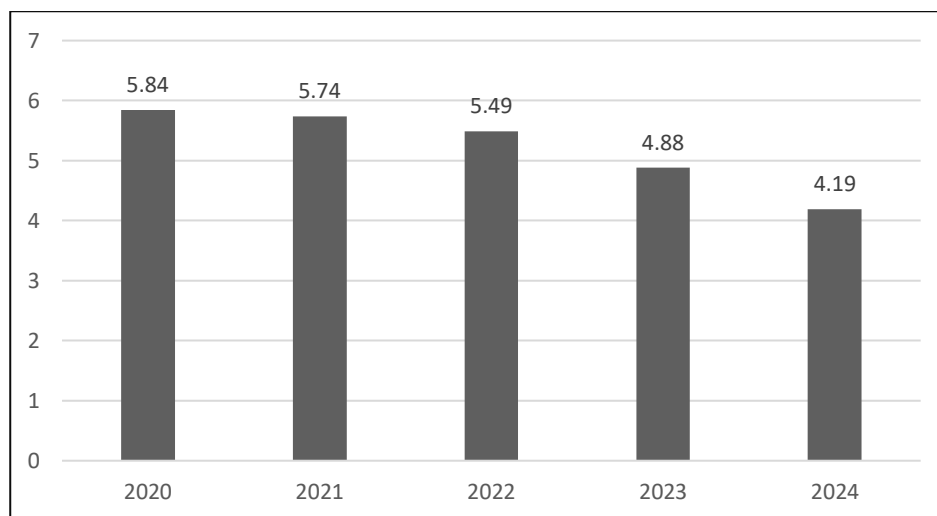
Arah pembangunan di Jawa Timur perlu menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata, serta distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang agar kesenjangan pembangunan manusia antar daerah dapat diminimalkan (Nugroho & Lathifah, 2025). Wilayah metropolitan seperti Surabaya, Malang dan Madiun menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dan stabil menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebaliknya Kabupaten di wilayah Madura seperti Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan serta beberapa daerah di kawasan Tapal Kuda (misalnya Probolinggo dan Situbondo), tampak memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, bahkan menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun tertentu.

Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pada dasarnya memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah. Sebab, kemiskinan bukanlah persoalan tunggal yang dapat diatasi hanya dengan menyalurkan bantuan tunai atau mengejar target statistik semata. Di balik angka kemiskinan yang terpampang dalam laporan pemerintah, ada jutaan kisah tentang keluarga yang setiap harinya bergulat dengan keterbatasan kesulitan mengakses sekolah berkualitas untuk anak-anak mereka, ketakutan saat anggota keluarga jatuh sakit karena biaya berobat yang mahal, serta ketidakpastian pekerjaan yang membuat mereka sulit merencanakan masa depan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya terfokus pada penurunan angka kemiskinan kuantitatif, tetapi juga harus menyentuh dimensi kualitas hidup kelompok masyarakat miskin. Dibutuhkan kebijakan yang tidak sekadar memberi ikan, tetapi juga menyediakan kail dan mengajarkan cara memancing secara berkelanjutan.

Perbaikan kualitas hidup tersebut dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, serta menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Ketika anak-anak dari keluarga miskin bisa

bersekolah dengan tenaga dan pikiran yang cukup karena gizi terpenuhi, ketika seorang ibu hamil tidak was-was memeriksakan kandungannya karena biaya bukan lagi hambatan, maka sesungguhnya pintu keluar dari kemiskinan mulai terbuka. Selain itu, penciptaan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan juga menjadi kunci utama, karena pekerjaan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang martabat dan rasa dihargai (Sari et al., 2020).

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mempertahankan kondisi tersebut. Perbedaan kemampuan ekonomi membuat sebagian kelompok semakin sulit mengakses layanan dasar, seperti pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai. Akibatnya, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pengetahuan dan kesehatan, cenderung stagnan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekedar masalah pendapatan yang rendah, namun juga keterbatasan akses terhadap peluang pengembangan diri. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM melalui investasi dalam sumber daya manusia, misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki kondisi gizi masyarakat dan layanan kesehatan preventif merupakan instrumen yang efektif untuk memperkecil kedalaman kemiskinan sekaligus mengakhiri pola kemiskinan yang terus membatasi kehidupan kelompok tertentu kelompok masyarakat yang paling rentan (Yasrizal, 2022).



Gambar 3. Pengangguran Provinsi Jawa Timur

Sumber : (BPS, 2025)

Ketimpangan ekonomi yang lebar sering kali berjalan beriringan dengan kemiskinan multidimensi. Persoalan ini kemudian berujung pada tingginya angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (2020-2024) mencatat penurunan konsisten Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,84% pada masa puncak pandemi (2020) menjadi 4,19% di tahun 2024. Meskipun pengangguran turun signifikan, pertumbuhan IPM Jawa Timur tidak menunjukkan akselerasi yang seimbang. IPM hanya meningkat dari 70,83 (2020) menjadi 72,45 (2024), dengan rata-rata kenaikan tahunan hanya 0,4 poin. Kesenjangan antara penurunan yang lambat ini menguatkan dugaan bahwa

terdapat mekanisme yang lebih kompleks dalam memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur pasca pandemi. Melalui lensa teori permintaan agregat (*effective demand*) yang menekankan pada daya beli masyarakat sebagai penggerak utama perekonomian. Selain persoalan pengangguran, tantangan lain yang dihadapi dalam pasar tenaga kerja selama pandemi adalah bagaimana melindungi pekerja yang masih memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum menjadi perhatian serius sebagai upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja. Jika penyesuaian upah minimum yang disertai perkembangan ekonomi yang stabil dan peningkatan produktivitas, maka dampak negatif terhadap pengangguran dapat diminimalkan (Nurfardhan et al., 2025). Namun, terdapat ketimpangan yang signifikan antar wilayah. Kabupaten/kota dengan ekonomi industri dan perkotaan cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi, seperti Sidoarjo 6.49% pada 2024, Gresik 6.45%, Surabaya 4.91%, dan Malang Kota 6.10%. Sementara itu, beberapa wilayah terutama di kawasan Madura dan bagian timur justru mencatat angka pengangguran yang sangat rendah, misalnya Sumenep 1.69%, Pamekasan 1.64%, dan Pacitan 1.56%.

Perekonomian tidak ditentukan oleh kapasitas produksi, melainkan oleh permintaan agregat. Dengan kata lain, berapa output berupa barang dan jasa yang dihasilkan tergantung pada seberapa besar permintaan efektif terhadap barang dan jasa tersebut (Schumpeter & Keynes, 1936). Menurut perspektif Keynesian, permintaan agregat merupakan penggerak utama output dan tingkat employment (kesempatan kerja) suatu negara dalam jangka pendek. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dianggap krusial demi mendukung peningkatan kinerja ekonomi. Menurut Keynes, perubahan dalam permintaan agregat memiliki dampak langsung pada produksi dan lapangan kerja. Jika permintaan agregat meningkat, produksi meningkat dan pengangguran menurun. Sebaliknya, jika permintaan agregat menurun, produksi menurun dan tingkat pengangguran meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya berkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan di perkotaan fenomena kelebihan tenaga kerja di perkotaan seringkali memicu munculnya berbagai bentuk pengangguran yang kompleks. Banyak pendatang dari daerah, yang terpicu oleh janji kehidupan ekonomi yang lebih baik, justru menghadapi kenyataan pahit ketika keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan di kota. Akibatnya, sebagian besar dari mereka terpaksa berlabuh di sektor informal, yang meskipun memberikan penghasilan, namun seringkali tidak stabil dan minim jaminan sosial. Kondisi ini diperparah dengan kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja formal yang memadai, sehingga menciptakan lingkaran setan di mana migran perkotaan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Brar & Seo, 2021).

Aktivitas ekonomi yang terpusat di perkotaan memang menjadi magnet bagi para pencari kerja, namun ironisnya, daya tarik ini justru menciptakan ketidakseimbangan. Jumlah pekerja yang berbondong-bondong datang seringkali melampaui kapasitas penciptaan lapangan kerja, sehingga menyebabkan pengangguran struktural. Pasar tenaga kerja perkotaan gagal menyerap kelebihan tenaga kerja ini, yang pada akhirnya menciptakan surplus pasokan tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang mendalam

dalam perekonomian, seperti minimnya diversifikasi peluang kerja (Sitompul & Athoillah, 2023). situasi ini menggambarkan kelebihan penawaran tenaga kerja yang tidak sebanding dengan tingkat permintaan, sehingga memperlebar jurang antara pencari kerja dan ketersediaan posisi yang sesuai (Burlacu *et al.*, 2021).

Data Upah Minimum Provinsi (UMP) BPS tahun 2025 Jawa Timur yang menunjukkan tren kenaikan signifikan dari Rp 1.768.777 (2020) menjadi Rp 2.305.985 (2024), dengan lonjakan tertinggi 14.47% pada 2023 menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di tengah tekanan dunia usaha, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tetap mengalami penyesuaian tahunan, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih rendah. UMP meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di tengah lonjakan pengangguran dan stagnasi kedalaman Kemiskinan, efektivitas upah minimum dalam melindungi daya beli pekerja menghadapi tantangan. Kenaikan nominal upah minimum harus bersaing dengan tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang melanda rumah tangga. Dalam konteks ini, analisis UMP penting karena kenaikannya dapat mendorong dimensi standar hidup layak IPM, tetapi jika tidak seimbang, bisa memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Menurut Mankiw (2007), yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat upah tidak semata-mata berperan sebagai kompensasi ekonomi, serta berfungsi sebagai sarana motivasi yang memperkuat hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tersebut bekerja melalui peningkatan kesejahteraan material pekerja, yang sehingga bisa mencukupi lebih baik terhadap nutrisi, layanan kesehatan, dan Pendidikan ketiga komponen utama pembentuk IPM.

Menurut teori efisiensi upah (efisiensi upah), peningkatan tingkat upah dapat menjadi Salah satu kunci utama supaya produktivitas tenaga kerja bisa naik, yaitu faktor pendukungnya harus kuat. Upah yang lebih tinggi tidak hanya ber sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen motivasi yang memperkuat hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan (Mankiw, 2007). Tingkat upah memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas pekerja. pekerja yang menerima upah layak cenderung mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dengan lebih baik, yang berimplikasi pada kondisi fisik yang lebih sehat dan peningkatan produktivitas. Kebijakan upah tinggi ini membantu perusahaan menekan biaya rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja baru karena frekuensi keluar-masuk karyawan menjadi lebih rendah. Tingkat upah juga berpengaruh terhadap kualitas rata-rata tenaga kerja di dalam perusahaan. Upah yang tinggi dapat mendorong peningkatan etos kerja dan usaha individu dalam melaksanakan tugas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat upah tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat pada kondisi upah di Jawa Timur. Berdasarkan data Upah Minimum (UMP) Jawa Timur tahun 2020–2024, terdapat disparitas upah yang signifikan antar wilayah, di mana wilayah metropolitan seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo konsisten mencatat UMP tertinggi sekitar Rp.4,6–4,7 juta pada 2024. Kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian Jawa Timur. Tingginya biaya hidup lebih tinggi dengan wilayah lain. Tingginya biaya hidup merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penentuan upah minimum yang lebih besar. Selain itu produktivitas tenaga kerja di wilayah Surabaya,

Sidoarjo dan Gresik cenderung lebih tinggi karena adanya konsentrasi berbagai industri dan jasa. Keberadaan sektor-sektor ini memungkinkan perubahan menawarkan upah yang lebih kompetitif, dibarengi dengan tingginya permintaan terhadap pekerja yang berkualifikasi dan berpengalaman.

Sebaliknya, kabupaten seperti Sampang, Situbondo, dan Pacitan berada di level terendah sekitar Rp2,1–2,3 juta. Aturan main soal gaji buruh itu sudah diatur dalam undang-undang, tepatnya Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003. Pemerintah wajib membuat kebijakan yang adil dan melindungi pekerja. Misalnya dengan adanya upah minimum yang beda-beda tiap daerah atau sektor. Angka upah minimum itu ditentukan berdasarkan produktivitas dan seberapa besar ekonomi lagi tumbuh (Damanik & Zalukhu, 2021). Perbedaan tingkat upah antar daerah mencerminkan variasi biaya hidup dan kondisi ekonomi lokal yang tidak seragam. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum diharapkan mampu membentuk kondisi yang seimbang antara daya saing perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kemiskinan, kemiskinan, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun tetap menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Faizin (2021) menggunakan metode regresi data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010–2018 dengan variabel upah minimum, kemiskinan dan Pengangguran pada IPM hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Pada temuan Susilowati Dados (2023) menggunakan metode judgement sampling untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan pada penelitian Fahirah (2023) menggunakan metode time series untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, dan investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran, tingkat inflasi, dan investasi berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap IPM.

Selanjutnya, Lestari (2023) melalui pendekatan uji asumsi klasik memperoleh hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Berbeda dengan temuan tersebut, Iman & Yuniyarti (2020) menggunakan panel data regresi dan menemukan bahwa persentase penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan, upah minimum berpengaruh positif signifikan, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) sebagai indikator kemiskinan. Berbeda dengan ukuran kemiskinan yang hanya menggambarkan jumlah atau rata-rata kemiskinan penduduk miskin, P2 mengukur ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin sehingga mampu menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan secara lebih mendalam. Kedua, penelitian ini menggunakan panel data 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur periode 2020–2024 , yaitu periode yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai pengaruh ketimpangan kemiskinan, kemiskinan, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2020–2024. Secara parsial, diduga bahwa ketimpangan kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020–2024. Selanjutnya, diduga bahwa pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020–2024. Selain itu, diduga bahwa upah minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020–2024. Secara simultan, diduga bahwa ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab hubungan pengaruh antar variabel. Tujuan dari pendekatan explanatori adalah menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam memahami mengapa suatu fenomena terjadi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument standar yang menghasilkan data dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Menggunakan data sekunder digunakan berasal dari laman resmi Badan Pusat statistik serta menggunakan data deret waktu dari tahun 2020-2024. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota dengan rentang waktu 5 tahun dengan total 190 observasi.

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel, peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengamatan terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur secara berkala dari waktu ke waktu. Sebelum masuk ke analisis utama, langkah krusial yang harus dilakukan adalah menentukan model mana yang paling cocok digunakan, apakah *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*. Pemilihan model ini mengacu pada prosedur baku melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. (Basuki & Prawoto, 2023). Secara matematis, model penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 KMNit + \beta_2 PGRNit + \beta_3 UMNit + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia
 (Dependent)

KMN_{it}	= Ketimpangan Kemiskinan (Independent)
$PGRN_{it}$	= Pengangguran
UMN_{it}	= Upah Minimum
β_{it}	= Konstanta
$B1, \beta2, \beta3$	= Koefisien Variabel Bebas
ε	= <i>Error Term</i>
I	= <i>Crossection</i> (Provinsi)
t	= <i>Time Series</i> (Tahun)

Pemilihan Model

Dalam analisis data panel, ada tiga pendekatan estimasi yang bisa digunakan, yaitu *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Untuk menentukan model mana yang paling pas dan menghasilkan estimasi terbaik, dilakukan dua pengujian statistik, yakni Uji Chow dan Uji Hausman. Kedua uji ini menjadi acuan dalam memilih model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Uji Chow

Langkah awal adalah melakukan Uji Chow, yang digunakan untuk membandingkan mana yang lebih cocok antara *fixed effect model* dan *Common Effect Model*. Kalau nilai $\text{prob} > F$ nya lebih besar dari 0,05, berarti model yang dipilih adalah CEM. Sebaliknya, kalau $\text{prob} > F$ nya di bawah 0,05, maka FEM yang dianggap lebih tepat dan akan digunakan sebelum nanti dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memutuskan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih cocok. Caranya cukup dengan melihat nilai probabilitas *Chi Square* nya. Kalau angkanya di bawah 0,05, maka *fixed effect* yang dipilih. Sebaliknya, kalau di atas 0,05, *random effect* jadi pilihannya.

Langrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier hanya dilakukan dalam skenario tertentu, yaitu ketika Uji Chow memilih *common effect model* (CEM) dan Uji Hausman memilih *Random Effect Model* (REM). Sementara itu, jika kedua uji sebelumnya sudah sepakat dan secara konsisten menunjukkan *fixed effect model* (FEM) sebagai model yang paling tepat, maka Uji Lagrange Multiplier tidak perlu lagi dijalankan.

Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Model regresi dinyatakan mengalami multikolinearitas apabila terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi melebihi 0,85. Di luar kondisi itu, yaitu ketika koefisien korelasi berada pada

tingkat yang rendah, model tersebut dinilai bebas dari gangguan multikolinearitas (Basuki & Prawoto, 2023).

b. Uji Heteroskedastisitas

Kriteria bebas heteroskedastisitas terpenuhi ketika nilai probabilitas (baik dari uji statistik maupun uji F). Kondisi ini menunjukkan bahwa residu pada model memiliki varians yang konstan atau bersifat homoskedastis.

Uji Statistik

Uji F

Uji F menguji apakah kombinasi seluruh variabel independen memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Hasil uji dinyatakan signifikan jika nilai Prob (F-statistik) $< 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna secara statistik.

Uji t

Uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Keputusan diambil dengan membandingkan *P-Value* terhadap angka 0,05: lebih kecil berarti signifikan, lebih besar berarti tidak signifikan.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi tersebut dalam menggambarkan dan menjelaskan dinamika variabel yang menjadi objek prediksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke analisis regresi data panel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan model mana yang paling pas. Ada beberapa pengujian bertahap di sini. Pertama, Uji Chow dipakai buat milih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Nah, kalau sudah, lanjut ke Uji Hausman yang akan membandingkan antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Terakhir, ada Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang berguna buat nimbang nimbang antara CEM dan REM. Dari serangkaian uji itulah model mana yang paling cocok buat dipakai di analisis selanjutnya.

Tabel 1 Pemilihan Model

Pemilihan Model	Effect Test	Prob
Uji Chow	Prob > F	0.00
Uji Hausman	Prob > Chi2	0.00

Sumber : Hasil Olahan Stata 17

Kalau dilihat dari hasil Uji Chow, nilai Prob > F-nya 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya, Fixed Effect Model (FEM) jadi pilihan. Begitu juga dengan Uji Hausman, nilai Prob > Chi2-nya juga 0,0000 atau di bawah 0,05, jadi FEM yang terpilih. Dari kedua uji ini sudah jelas kalau Fixed Effect Model adalah pendekatan

yang paling cocok buat menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Dengan begitu, Uji Lagrange Multiplier jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena uji itu hanya relevan buat membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM), sementara FEM sudah keluar sebagai model yang paling pas.

Regresi data panel dengan metode OLS, pengujian asumsi klasik tetap penting, tetapi fokus utamanya dapat keseimbangan pada multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2023).

Tabel 2 Hasil Multikolinearitas

	KMN	PGR	UM
KMN	1	-0.19	-0.22
PGR	-0.19	1	0.35
UM	-0.22	0.35	1

Sumber : Hasil Olahan Stata 17

Sebagaimana yang tertera pada tabel, model regresi tidak mengalami masalah Multikolinearitas. Karena nilai koefisien kurang dari 0,85.

Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan varians dalam residual model regresi antar observasi, yang dapat mengganggu efisiensi estimator OLS .

Tabel 3 Hasil Heteroskedastisitas

Chi2(1)	2.49
Prob > Chi 2	0.11

Sumber : Hasil Olahan Stata 17

Dapat disimpulkan bahwa nilai Prob > Chi2 0,11 > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Secara lebih spesifik, pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam pelaksanaannya, uji hipotesis mencakup tiga pendekatan utama. Pertama, uji t yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial atau individu. Kedua, uji F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Ketiga, analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi atau kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikatnya. Ketiga pengujian ini saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian.

Selanjutnya yaitu dilakukan uji t pada tabel 4 yang tertera pada lampiran variabel Ketimpangan Kemiskinan nilai *p-value* $0.00 < 0.05$ yang mengartikan bahwa nilai

kurang 0.05. Maka secara parsial Ketimpangan Kemiskinan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, hasil penelitian variabel pengangguran nilai $p\text{-value}$ $0.21 > 0.05$ yang mengartikan bahwa nilai lebih 0.05, maka secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian variabel upah minimum nilai $p\text{-value}$ $0.00 < 0.05$ yang mengartikan bahwa nilai kurang 0.05. Maka secara parsial upah minimum memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Merujuk pada tabel 5 yang tertera pada lampiran nilai $Prob > F$ $0.00 < 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai $Prob > F$ kurang dari 0,00. Jadi secara bersama-sama variabel bebas seperti berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia selama periode 2020 hingga 2024.

Terakhir dilakukan Koefisien determinasi (R^2), Hasil koefisien determinasi dalam model panel data menunjukkan bahwa variabel ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 70% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam setiap wilayah dari waktu ke waktu (*within effect*), namun hanya menjelaskan 31% perbedaan IPM antar wilayah (*between effect*) dan 32,43% secara keseluruhan (*overall*), Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun model mampu menjelaskan variasi IPM di masing-masing kabupaten/kota dengan baik, masih terdapat perbedaan karakteristik pembangunan manusia antarwilayah di Jawa Timur yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian .

Untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan tersebut, dilakukan analisis deskriptif berdasarkan karakteristik wilayah di Jawa Timur yang mencakup wilayah metropolitan, Madura, dan Tapal Kuda. Berdasarkan data penelitian, terdapat disparitas pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Wilayah metropolitan yang terdiri atas Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2024, IPM Kota Surabaya mencapai 84,69 , Kabupaten Sidoarjo 82,67 , dan Kabupaten Gresik 78,93 . Sebaliknya, wilayah Madura memiliki IPM yang lebih rendah, yaitu Bangkalan 67,33 , Sampang 66,72 , Pamekasan 70,85 , dan Sumenep 69,78. Sementara itu, wilayah Tapal Kuda menunjukkan kondisi yang lebih bervariasi, misalnya Banyuwangi memiliki IPM 74,30 , sedangkan Bondowoso 71,22, Situbondo 71,22 ,dan Kabupaten Probolinggo 70,85. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur masih berada di wilayah metropolitan, sedangkan wilayah Madura dan sebagian Tapal Kuda masih menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ketimpangan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Ketimpangan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam perspektif Teori Kapabilitas Amartya Sen, ketimpangan kemiskinan bukan sekadar perbedaan angka pendapatan, melainkan

sebuah fenomena yang secara sistemik menggerogoti inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Sen berargumen bahwa kemiskinan sesungguhnya adalah deprivasi kebebasan yakni ketidakmampuan individu untuk mengubah sumber daya yang ada menjadi kehidupan yang mereka hargai, seperti hidup sehat, terdidik, atau berpartisipasi dalam Masyarakat (Sen, 1992). Ketimpangan yang lebar tidak hanya tercermin dalam perbedaan pendapatan, tetapi juga menjelma menjadi batas sosial dan struktural yang menghalangi kelompok termarginalisasi untuk benar-benar menikmati hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, mereka kerap terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan, di mana akses yang terbatas terhadap layanan publik justru semakin melanggengkan ketertinggalan dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Di wilayah Madura dan sebagian Tapal Kuda yang masih memiliki tingkat ketimpangan kemiskinan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah metropolitan, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) yang lebih tinggi di wilayah Madura menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan wilayah metropolitan seperti Kota Surabaya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa masyarakat miskin di Madura menghadapi keterbatasan yang lebih besar dalam memperoleh layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Selain itu, struktur perekonomian Madura masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro dengan produktivitas yang relatif rendah, sehingga pendapatan masyarakat cenderung lebih terbatas. Berbeda dengan Surabaya yang merupakan pusat perdagangan, jasa, industri, dan pemerintahan, sehingga memiliki infrastruktur yang lebih maju, akses layanan publik yang lebih lengkap, serta kesempatan kerja yang lebih beragam. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan tingkat kedalaman kemiskinan di wilayah Madura relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah metropolitan.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan akses layanan kesehatan preventif, pemerataan kualitas pendidikan melalui program afirmasi berbasis keluarga, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sementara itu, pada wilayah metropolitan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, kebijakan dapat difokuskan pada pengendalian biaya hidup, peningkatan kualitas pekerjaan formal, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja agar peningkatan pendapatan mampu ditiru oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan manusia di Jawa Timur perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggarisbawahi bahwa ketimpangan multidimensional tidak hanya merenggut kesejahteraan materi, tetapi juga memperkuat eksklusi sosial dan menghambat mobilitas antargenerasi. Trisno (2022), Lestari (2023), dan Indiaty (2024) bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan. Kemiskinan bukan sekadar kondisi kekurangan materi, melainkan sebuah belenggu multidimensi yang menghambat potensi manusia, ia adalah dinding tak kasat mata yang membatasi seorang anak untuk bermimpi setinggi langit, karena sejak kecil ia sudah disibukkan oleh pertanyaan tentang akan makan apa esok hari. Ketika orang tua harus memilih antara membeli buku atau mengisi perut anaknya, saat itulah kemiskinan memadamkan cahaya masa depan. Lebih dari sekadar

angka statistik, kemiskinan adalah cerita tentang potensi-potensi besar yang terkubur begitu saja, tentang jiwa-jiwa yang seharusnya bisa terbang namun sayapnya terpotong oleh keadaan. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Widodo *et al* (2025) kemiskinan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang. Bukan berarti kemiskinan tidak penting, tetapi ada faktor lain yang perannya lebih besar dalam mendorong IPM, seperti kualitas pelayanan publik, besarnya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta seberapa efektif kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengangguran menunjukkan arah pengaruh negatif terhadap Indeks Manusia (IPM), namun tidak signifikan secara statistik. Melalui lensa teori permintaan agregat (*effective demand*) yang menekankan pada daya beli masyarakat sebagai penggerak utama perekonomian. Dalam kerangka ini, rendahnya permintaan agregat bukan sekadar kapasitas produksi atau ketersediaan tenaga kerja menjadi penghambat pertumbuhan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, status pengangguran secara statistik mungkin tidak langsung dan kuat mempengaruhi IPM karena dampak sesungguhnya lebih dimediasi oleh rendahnya permintaan efektif yang dihasilkan. Dampak pengangguran terhadap kesejahteraan seseorang tidak selalu berwujud tunggal, sebab dalam realitasnya, individu yang kehilangan pekerjaan kerap masih dapat bertahan melalui jaringan sosial yang melingkupinya. Pendapatan dari anggota keluarga lain yang bekerja, uluran tangan program bantuan sosial, atau bahkan upaya kecil berkebun di pekarangan rumah menjadi katup penyelamat yang menjaga kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Dengan kata lain, variabel pengangguran semata tidak cukup tajam untuk memotret secara utuh kemerosotan standar hidup, kesehatan, dan akses pendidikan yang sesungguhnya mungkin saja terjadi secara diam-diam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan belum tentu diikuti oleh perubahan kualitas pembangunan manusia. Salah satu penyebabnya adalah struktur pasar kerja di Jawa Timur yang masih didominasi oleh sektor informal. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per februari 2026 sekitar 64,44% penduduk yang bekerja di Jawa Timur merupakan pekerja sektor informal, sedangkan sisanya bekerja di sektor formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja tetap memiliki aktivitas ekonomi meskipun tidak bekerja pada sektor formal. Dengan demikian, ketika terjadi penurunan kesempatan kerja formal, sebagian masyarakat cenderung beralih ke sektor informal dibandingkan menjadi penganggur terbuka. Akibatnya, perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak secara langsung mencerminkan perubahan kesejahteraan masyarakat maupun kualitas pembangunan manusia, sehingga variabel kemiskinan dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan menjadi aspek yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja, karena pekerjaan informal umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, produktivitas yang terbatas, dan perlindungan sosial yang lebih minimal dibandingkan pekerjaan formal. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian dengan penelitian Adianita (2023), Yuniyaarti (2020), dan (Fahirah, 2023) yang menyatakan pengangguran memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan hal ini bisa disebabkan terjadinya setiap tahun, ribuan bahkan jutaan pencari kerja baru dari berbagai latar belakang pendidikan berjejal memasuki pasar tenaga kerja, membawa

harapan dan mimpi untuk segera mandiri. Namun, kenyataan pahit harus mereka hadapi ketika jumlah lowongan yang tersedia tak sebanding dengan deras arus angkatan kerja, sehingga persaingan pun kian ketat dan banyak yang akhirnya tersisih. Akibatnya, alih-alih mendapatkan pekerjaan layak, tak sedikit dari mereka justru terpaksa menganggur panjang atau menerima pekerjaan di bawah kualifikasi sekadar untuk bertahan hidup.

Ditambah lagi, keahlian yang dimiliki para pencari kerja sering tidak cocok sama apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga terjadi kesenjangan antara kompetensi yang ada dan kebutuhan pasar kerja. Sedangkan penelitian oleh Sholikhah & Djohan (2025) pengangguran tidak memiliki hubungan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pengangguran terbuka tidak hanya mencakup individu dari kelompok miskin, tetapi juga berasal keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, sehingga tidak semua pengangguran berdampak langsung pada penurunan IPM.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan upah minimum berkontribusi terhadap perbaikan dimensi kesejahteraan yang tercermin dalam IPM. Hubungan ini dapat dijelaskan secara teoretis melalui teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) yang dikemukakan oleh Mankiw (2007), yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat upah tidak hanya berperan sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen motivasi yang meningkatkan kualitas kerja antara pengusaha dan karyawan. Penelitian ini sejalan dengan Nailufar *et al* (2024) membuktikan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di beberapa provinsi IPM di Indonesia, sehingga memperkuat bukti empiris bahwa Ketika upah minimum dinaikkan secara berkeadilan, pekerja tidak hanya memperoleh tambahan nominal, tetapi juga napas baru untuk menghidupi keluarganya dengan lebih layak makanan bergizi tersedia di meja, anak-anak bisa terus bersekolah tanpa khawatir dan kunjungan ke puskesmas bukan lagi perkara menakutkan karena biaya. Perbaikan akses terhadap kebutuhan dasar inilah yang secara perlahan namun pasti mendorong naiknya indikator pembangunan manusia, karena kesehatan dan pendidikan yang terpenuhi menjadi fondasi bagi produktivitas dan masa depan yang lebih cerah.

Dengan demikian, kebijakan upah minimum yang tepat sasaran bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, bermartabat, dan berdaya saing. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Lestari (2023) bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Menariknya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kenaikan upah minimum belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena kenaikan upah justru sering diikuti oleh pemutusan hubungan kerja, sehingga dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi tidak maksimal

KESIMPULAN

Ketimpangan kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020-2024. Pengangguran secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020-2024. Upah minimum secara parsial berpengaruh positif signifikan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2020-2024. Dan yang

terakhir Ketimpangan kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia tahun 2020-2024.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkuat Teori Kapabilitas Amartya Sen, yang menyatakan bahwa ketimpangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan manusia. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang mampu menjelaskan ketimpangan di antara penduduk miskin sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia, sedangkan peningkatan upah minimum terbukti menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong peningkatan IPM di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Wilayah Madura dan Tapal Kuda perlu diprioritaskan pada peningkatan akses layanan kesehatan preventif, pemerataan kualitas pendidikan melalui program afirmasi berbasis keluarga, serta penguatan program pengentasan kemiskinan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami mekanisme pengaruh pengangguran yang tidak signifikan secara parsial, misalnya dengan membedakan jenis pengangguran atau menambah variabel moderasi. Memperluas cakupan penelitian dengan menambah periode, wilayah, atau variabel independen baru (seperti anggaran daerah) juga diperlukan.

REFERENSI

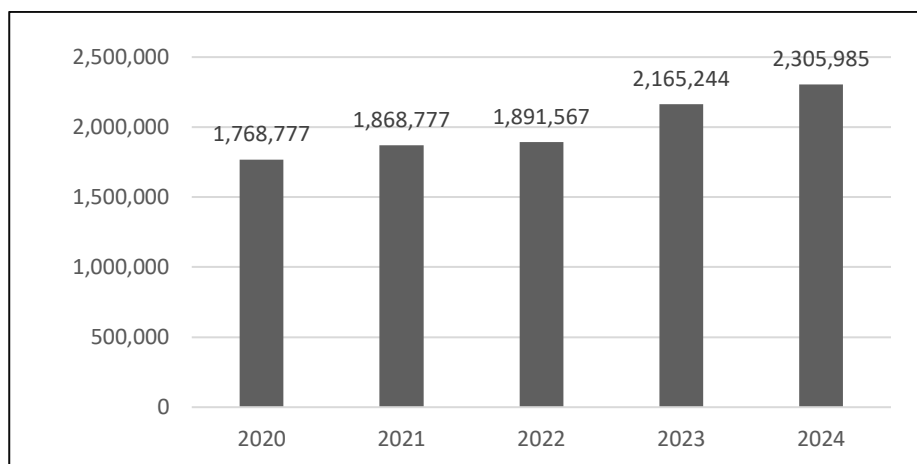
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. 1–236.
- Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital : A Theoretical Analysis Author (s): Gary S . Becker Source : Journal of Political Economy , Oct ., 1962 , Vol . 70 , No . 5 , Part 2 : Investment in Human Beings (Oct ., 1962), pp . 9-49 Published by : The University of Ch. *The University Of Chicago Press Journals*, 70(5), 9–49.
- BPS. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/05/27/47fde052cb353c601c21c209/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-jawa-timur-2024.html>
- BPS. (2025). *Ketimpangan Kemiskinan Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/query-builder>
- BPS. (2025). *Pengangguran Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html>
- BPS. (2025). *Upah Minimum Jawa Timur*. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI5IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-umk-dan-provinsi-ump-di-jawa-timur.html>
- Brar, K., & Seo, B. (2021). *Original Paper Migration Pattern across the Indian*

- States — Analysis of Census 2001 and 2011*. 4(1), 20–42.
<https://doi.org/10.22158/ape.v4n1p20>
- Burlacu, S., Diaconu, A., Gole, I., Economic, T., Economic, T., Burlacu, S., & Diaconu, A. (2021). *The Economic and Social Effects of Unemployment in Romania*. 21–27. <https://doi.org/10.24818/RMCI.2021.1.21>
- Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN. ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENETAPAN BESARAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA PEMATANGSIANTAR, 3(1), 38–1.
- Fahirah, N. (2023). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, TINGKAT INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Journal of Regional Economics*, 4(3), 156–165.
- Ibrahim. (2025). Dinamika Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 11(1), 100–121.
- Iman, F. N., & Yuniyarti, N. A. (2020). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.
- Indiati, P.S., Taufiq, M., O. &, & Sandi, P. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap PHT Di Kabupaten Jombang.pdf. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 734–743.
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 236.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642>
- Kumar, B., & Pinky, S. D. (2021). Addressing economic and health challenges of COVID-19 in Bangladesh: Preparation and response. *Journal of Public Affairs*, 21(4), 1–8. <https://doi.org/10.1002/pa.2556>
- Lestari, D. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah, Upah Minimum Provinsi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(2), 101–128.
<https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2471>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi (cet. Ke-6)*. Erlangga.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI IINDONESIA (STUDI KASUS 11 PROVINSI IPM LOWER MEDIUM). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 11–22.
- Nugroho, H. A., & Lathifah, N. (2025). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *Independent:*

Journal Of Economics, 5, 11–23.

- Nurfilah, S., & Satiti, S. (2023). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kualitas Manusia Indonesia. *Society*, 13(1), 18–26.
<https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5233>
- Prihandini, G. (2025). *Penetapan Upah Minimum Provinsi yang Berkeadilan bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- Rahmadia Shinta, F. N. (2020). *Dampak covid-19 terhadap ekonomi*. 1–9.
- Renner, S., Bok, L., Igloi, N., & Linou, N. (2018). *WHAT DOES IT MEAN TO LEAVE NO ONE BEHIND?* (Issue July).
- Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined*.
- Sholikhah, F. N., & Djohan, S. (2025). *Pengaruh Jumlah Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda The Effect of the Number of Unemployed and the Number of Poor Population on the Human Development Index in Samarinda City*. 22(3), 300–310.
- Simalango Mikhael, S. R. I. S. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL Volume*, 6(2), 433–442.
- Sitompul, N. K., & Athoillah, M. (2023). *Indonesia ' s You th Unemployment Rate : Evidence from Sakernas Data*. 6(1), 347–357.
- Sulthan Hanifa Nefertiti St. (2023). *Pengenalan indikator kemiskinan dan ketimpangan*. Statistisi BPS Prov Jawa Barat.
<https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/05.-Pengenalan-Indikator-Kemiskinan-dan-Ketimpangan-BPS.pdf>
- Susilowati Dados, H. A. (2023). *PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA : PENGALAMAN DARI KABUPATEN*. 2(1), 77–98.
- Trisno, T. U., & Oktarina, Y. (2022). *Pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di provinsi sumatera selatan tahun 2016-2020*. 4(8), 3560–3566.
- Widiawaty, M. A., Lam, K. C., Dede, M., & Asnawi, N. H. (2022). Spatial differentiation and determinants of COVID - 19 in Indonesia. *BMC Public Health*, 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13316-4>
- Widodo, M. H., Rohman, M. F., Sari, N. D. K., Djatmiko, A. R., & Mas'adah. (2025). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN JOMBANG*. *Jurnal EBA*, 12(1), 1–10.
- Yasrizal, F. &. (2022). *Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap*. 03, 1–8.

LAMPIRAN



Gambar 4. Upah Minimum Provinsi Jawa

Tabel 4 Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-Value
KMN	- 0,26	0,02	- 3,62	0
PGR	- 0,02	0,01	- 1,24	0.21
UM	0,44	0,03	13,83	0
Cons	66,76	3,86	17,28	0
R.Squared				
:				
Within	0.7			
Between	0.31			
Overall	0.32			

Sumber : Hasil Olahan Stata 17

Tabel 5 Uji F

Nilai	
F(3,149)	117.11
Prob > F	0

Sumber : Hasil Olahan Stata 17